



LAPORAN PENANGGAMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Semester 1 Tahun 2023

KECAMATAN BALONGBENDO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Kecamatan Balongbendo dalam melakukan pengawasan intern, dalam hal ini monitoring dan evaluasi terhadap benturan kepentingan dapat diselesaikan dengan baik dan dituangkan dalam bentuk Laporan Monitoring Evaluasi Benturan Kepentingan Semester 1 Tahun 2023 di Lingkup Kecamatan Balongbendo.

Kecamatan Balongbendo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyadari bahwa diperlukan suatu kondisi yang terbebas dari adanya benturan kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Kecamatan Balongbendo senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaporan pelanggaran yang telah dilaksanakan. Perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*) dalam melaksanakan penanganan pelaporan pelanggaran telah menjadi komitmen Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung terciptanya Kecamatan Balongbendo yang lebih baik.

Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan kedepannya.



Sidoarjo, 5 Juli 2023

CAMAT BALONGBENDO

ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19790114 199711 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	4
BAB II Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan	5
2.1 Pencapaian Semester 1 Tahun 2023	5
2.2 Resume Pencapaian Semester 1 Tahun 2023	6
BAB III Analisis dan Evaluasi	7
3.1 Analisis	7
3.2 Kendala	9
3.3 Evaluasi	9
BAB IV Kesimpulan dan Saran	10
4.1 Kesimpulan	10
4.2 Saran	10
4.3 Rencana Tindak Lanjut	10
Lampiran I	
Rekapitulasi Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan	
Lingkup Kecamatan Balongbendo Periode Januari sd Juni 2023	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perangkat Daerah Kecamatan Balongbendo merupakan unsur pembantu Bupati dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Balongbendo tidak lepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal. Interaksi yang dilakukan tersebut terkadang berpotensi untuk terjadinya benturan kepentingan dalam diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana dapat mempengaruhi pengambilan keputusan menjadi tidak profesional dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan karena adanya pertimbangan pribadi lain. Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan baku yang mengatur penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta interaksi antara pegawai atau pejabat Kecamatan Balongbendo dengan para pemangku kepentingan.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, Kecamatan Balongbendo menyadari pentingnya menerapkan strategi penanganan adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi maupun Pegawai di lingkungan Kecamatan Balongbendo. Dengan adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dengan didasari etika hubungan interaksi yang baik di lingkungan Kecamatan Balongbendo maupun dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kesungguhan dan konsistensi penanganan benturan kepentingan akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan.

1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
- h. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

MONITORING PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kecamatan Balongbendo sebagai lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat telah berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani. Tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) salah satunya adalah penanganan benturan kepentingan. Salah satu upayanya adalah mengacu Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kecamatan Balongbendo telah memiliki rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2023 yang berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program, kebijakan dan kegiatan Reformasi Birokrasi Kecamatan Balongbendo tahun 2023. Secara umum, rencana aksi Reformasi Birokrasi Kecamatan Balongbendo dikelompokkan menjadi 8 (delapan) program, salah satunya adalah penguatan pengawasan. Salah satu ukuran keberhasilan dari program tersebut adalah penanganan benturan kepentingan.

2.1 PENCAPAIAN SEMESTER 1 TAHUN 2023

a. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan kepada seluruh ASN dan Non ASN di Kecamatan Balongbendo

b. Implementasi Benturan Kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan di lingkungan Kecamatan Balongbendo. Bentuk Implementasi penanganan benturan kepentingan antara lain dituangkan dalam bentuk:

- 1) Pakta integritas seluruh pegawai
- 2) Pakta integritas Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa
- 3) Identifikasi potensi benturan kepentingan oleh setiap unit kerja di Lingkungan Kecamatan Balongbendo

2.2 RESUME PENCAPAIAN SEMESTER 1TAHUN 2023

Dalam rangka implementasi penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kecamatan Balongbendo, telah disosialisasikan dalam Apel Pagi yaitu :

1. ASN dan Non ASN yang berpotensi menghadapi situasi Benturan Kepentingan wajib menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Jika berdasarkan hasil penilaian risiko disimpulkan bahwa risiko dapat diterima, maka ASN dan Non ASN yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut serta melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan.
3. Tim Zona Integritas berkewajiban:
 - a. Mengidentifikasi potensi Benturan Kepentingan tiap semester yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - b. Menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan tiap semester/ tiap saat ketika terjadi Benturan Kepentingan.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi internal tiap semester dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganan Benturan Kepentingan Semester 1 Tahun 2023 telah dilakukan pembahasan pada Rapat Internal bersamaan dengan Evaluasi Internal Tribunal 2 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Berdasarkan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan Semester 1 Tahun 2023 yang dilaksanakan terhadap identifikasi potensi Benturan Kepentingan Unit Kerja yang berada di Kantor Kecamatan Balongbendo terdapat 36 pegawai di lingkungan Kecamatan Balongbendo yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI

3.1 ANALISIS

Beberapa bentuk situasi Benturan Kepentingan yang dihadapi pegawai di lingkungan Kecamatan Balongbendo antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah, cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan Pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan dan/atau aset Kecamatan Balongbendo untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dan/atau rahasia Kecamatan Balongbendo dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di internal atau eksternal Kecamatan Balongbendo yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
8. Situasi bekerja di luar tupoksi pekerjaan pokoknya.
9. Situasi yang memungkinkan penyalahgunaan wewenang.
10. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa
11. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya
12. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan

wewenang

Beberapa sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi pegawai di lingkungan Kecamatan Balongbendo antara lain :

1. Penyalahgunaan wewenang
2. Perangkapan jabatan di internal atau eksternal Kecamatan Balongbendo yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya
3. Hubungan afiliasi dengan obyek layanan/penyedia barang/jasa/stakeholder Kecamatan Balongbendo
4. Pemberian gratifikasi
5. Kepentingan Pribadi (*vested interest*)
6. Kelemahan sistem organisasi

Terhadap potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh pegawai di lingkungan Kecamatan Balongbendo telah dilakukan penanganan sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo yaitu :

- a. Melaporkan adanya potensi Benturan Kepentingan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Atasan pegawai melakukan penelaahan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan dan mengambil kesimpulan kebenaran ada/tidaknya Benturan Kepentingan.
- c. Atasan pegawai meneliti lebih lanjut potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. Kemudian melakukan analisis dapat atau tidaknya Benturan Kepentingan dikendalikan/dikelola. Sekiranya Benturan Kepentingan dapat dikendalikan, maka Atasan melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun sekiranya Benturan Kepentingan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka Atasan wajib melaksanakan penilaian risiko terhadap pelaksanaan kegiatan yang didalamnya terdapat Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan.
- d. Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat atau tidak dapat ditoleransi.

- e. Selanjutnya atasan pegawai memberikan putusan tindakan pencegahan penanganan potensi Benturan Kepentingan untuk yang tidak dapat dikendalikan.

3.2 KENDALA

Tidak ada kendala dalam pelaporan karena telah dikirim oleh Admin Benturan Kepentingan Kecamatan Balongbendo setiap bulan maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

3.3 EVALUASI

Berdasarkan hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang telah disusun, pada Semester 1 tahun 2023 telah teridentifikasi sebanyak 36 potensi benturan kepentingan. Potensi benturan kepentingan yang telah diidentifikasi, dibutuhkan tindakan penanganan yang dimonitoring secara lebih ketat dan berkala agar meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pegawai. Rincian identifikasi potensi Benturan Kepentingan, analisa penyebab dan tindakan penanganan Benturan Kepentingan dapat dilihat pada lampiran I. Atas kendala dan rencana tindak lanjut pada periode Semester 1 Tahun 2023, telah dilakukan:

- a. Laporan setiap bulan kepada Inspektorat Daerah.
- b. Sosialisasi serta internalisasi baik ketika Apel Pagi dan serta Sosialisasi kepada Perangkat Desa, untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap situasi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kecamatan Balongbendo.
- c. Pemantauan atas penanganan benturan kepentingan secara berkala oleh Tim Zona Integritas Kecamatan Balongbendo.
- d. Usul Peningkatan Kapasitas Aparatur dengan mengundang Inspektorat Daerah sebagai Narasumber.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Kecamatan Balongbendo menyadari betapa besarnya pengaruh benturan kepentingan terhadap objektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh para pegawai. Oleh karena itu, pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan pemantauan Semester 1 Tahun 2023, terdapat 36 pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan. Terhadap hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan tersebut, telah dilakukan penanganan sesuai mekanisme pada Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kecamatan Balongbendo.

4.2 SARAN

Untuk meningkatkan implementasi identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kecamatan Balongbendo maka perlu dilaksanakan:

- a. Sosialisasi serta internalisasi secara berkala untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap situasi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kecamatan Balongbendo dengan mengundang Inspektorat Daerah terkait pembinaan berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Pemantauan atas penanganan benturan kepentingan secara berkala

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka mengurangi kendala pelaksanaan dan implementasi penanganan Benturan Kepentingan akan dilaksanakan :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap situasi benturan kepentingan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kecamatan Balongbendo telah dianggarkan pada Perubahan Renja Tahun 2024.
- b. Pemantauan atas penanganan benturan kepentingan secara berkala

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
Lingkup Kecamatan Balongbendo
Periode Januari sd Juni 2023

No	Unit Kerja	Nama Pegawai yang Terkait	Jabatan Pegawai yang Terkait	Uraian Benturan Kepentingan	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	Sekretariat	1 ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP., MM	Camat	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
		2 HARY SUBAGIO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam proses pencairan penyedia barang/jasa	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
2	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1 Drs. MOHAMMAD ROFII	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan afiliasi (Menantu bekerja sebagai Perangkat Desa Wonokupang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Wonokupang
		2 FAHRUL AS-HAD	Pengolah Data Pelayanan	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan

					kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	sebagai Operator SIAK	<p>Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		3	DARMAWAN SUTRANGGONO	Pengolah Data Pelayanan	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Sekretaris Desa Wonokarang dan Pj. Kepala Desa Seduri)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Wonokarang dan Desa Seduri
		4	ELYZABETH RAHAYU, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Operator SIAK	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		5	DEWI KUSMIATI	Pengadministrasi Umum	Melakukan usaha wiraswasta Perusahaan Air Minum dalam Kemasan	Karena yang bersangkutan memiliki usaha sekaligus sebagai pemilik utama CV	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pegawai yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan pengiriman barang/supply air mineral ke Kecamatan Balongbendo
		6	JUNET	Pengadministrasi Kependudukan	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Sekretaris Desa Penambangan dan Pj. Kepala Desa Penambangan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa

							kepada Desa Penambangan
		7	DIANA DEWI RATNA PANJAWI, SE	Pengadministrasi Sarana Dan Prasarana	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Operator SIAK	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		8	IKA PRATINI APRILLINDA	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan afiliasi (Suami bekerja sebagai Perangkat Desa Bakalanwringinpitu)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Bakalanwringinpitu
		9	SUPRIBADI	Pramu Kebersihan	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		10	HOIRUL ANAM	Pramu Kebersihan	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
3	Sub Bagian Perencanaan dan	1	HAPPY APRILYAWATI, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

	Keuangan			Keuangan	PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam proses pencairan penyedia barang/jasa		<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
		2	KHAFIDZ KHASAN, A.Md	Bendahara	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas Bendahara Pengeluaran dalam proses pencairan penyedia barang/jasa	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
		3	RIADI	Pengelola Bahan Perencanaan	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Sekretaris Desa Suwaluh dan Pj. Kepala Desa Bakungpringgodani)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Sekretaris Desa Suwaluh dan Desa Bakungpringgodani)
		4	LINTANG AULIA, A.Md	Pengelola Keuangan	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas Staf Administrasi dalam proses pencairan penyedia barang/jasa	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
4	Seksi Pemerintahan	1	ARIES BUDIYANTO, SE	Plt. Kepala Seksi Pemerintahan Pengelola Administrasi Pemerintahan	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Pj. Kepala Desa Jeruklegi dan Bakungtemenggungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa

							kepada Desa Jeruklegi dan Bakungtemenggungan)
		2	SUPARDI, S.M	Pengadministrasi Pemerintahan	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Sekretaris Desa Wonokupang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Wonokupang
5	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	PENDY SUHANTORO	Pengadministrasi Umum	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		2	MOCH. KHOIRUL NAIM	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		3	ALDI SLAMET FIRMANTO	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi Pamong Praja)	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		4	ANANG WIDIANTO	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan

				Pamong Praja)	kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	sebagai Petugas Keamanan Kantor	Keentingan <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		5	DITYA ANTARTIKA	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi Pamong Praja)	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Keentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		6	MOCH CHOIRUN NASIR	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi Pamong Praja)	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan afiliasi (Istri bekerja sebagai Perangkat Desa Bakung Temenggungan)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Keentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Bakung Temenggungan
		7	TERY SISWANTO	Petugas Keamanan (Bantuan Polisi Pamong Praja)	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan afiliasi (Istri bekerja sebagai Perangkat Desa Balongbendo)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Keentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Balongbendo
6	Seksi Perekonomian	1	SUYONO	Pengelola Pembinaan Dan Pengembangan Perekonomian	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan pekerjaan (pernah menjadi Sekretaris Desa Seketi dan Pj. Kepala Desa Bogempinggir)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Keentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Seketi dan Desa Bogempinggir

		2	HINDUN HIDAYATI, S.M	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro, Kecil, Dan Menengah	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	ASVI MASCHUROH, SE., M. Ak	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		2	DWI ENDAH LUHWATI	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		3	SUMINTO	Pengelola Kesejahteraan Sosial	Potensi terjadi benturan kepentingan ketika melakukan pelayanan kependudukan dan non kependudukan	Hubungan afiliasi (Adik kandung bekerja sebagai Perangkat Desa Sumokembangsri)	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada Desa Sumokembangsri
8	Seksi Pembangunan	1	PRASETYO DWI PANGESTI ADJI, A.Md.	Plt. Kepala Seksi Pembangunan Pengelola Data	Situasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas Pejabat Pengadaan dalam proses pencairan penyedia	Penerimaan/pemberian gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Pakta integritas penyedia barang/jasa untuk mencegah KKN dan mengikuti proses

					barang/jasa		pengadaan secara bersih, transparansi dan profesional
		2	MUSTAIN	Pengadministrasi Umum	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		3	ADI PRAMUDIAH HENDRAWAN	Petugas Kebersihan (Pengumpul Sampah)	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		4	EDO FERDIANTO	Petugas Kebersihan (Pengumpul Sampah)	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		5	SATRIA WAYAH SAPUTRA AJI	Pengemudi (Truk/Gerobak Sampah)	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan sebagai Petugas Keamanan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
		6	IWAN PRASTYO ROMADONI	Pengemudi (Truk/Gerobak	Situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus	Hubungan pekerjaan yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pakta integritas semua pegawai • Membuat Surat Pernyataan Benturan

				Sampah)	kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan	sebagai Petugas Keamanan Kantor	<p>Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan pelayanan kependudukan dan non kependudukan secara istimewa kepada personil tertentu
--	--	--	--	---------	---	---------------------------------	--